LAPORAN PELAKSANAAN
SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI
PADA
PENGADILAN NEGERI, YOGYAKARTA
PERIODE TRIWULAN III TAHUN 2026
(JULI – SEPTEMBER 2026)

OKTOBER 2026

LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN HASIL SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI TRI WULAN III
TAHUN 2026
PADA PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA

Berdasarkan Permen PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017

Disahkan di Yogyakarta
Pada Hari Jumat, 16 Oktober 2026

Top Management

SYAFRIZAL, S.H

Sekretaris	**Ketua Tim Survei**
NINDYA YOSDALU PUTRA	**NURHADI, S.H**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Pemerintah sangat membutuhkan informasi dari unit pelayanan instansi pemerintah secara rutin, dengan harapan mampu memberikan gambaran mengenai kualitas pelayanan di instansi pemerintah kepada masyarakat, oleh karena itu Pengadilan Negeri Yogyakarta mengadakan survei ini. Survei ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggara Pelayanan Publik.

Filosofi dasar yang digunakan dalam pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat yang dapat diartikan bahwa kepuasan pelanggan dalam hal kualitas pelayanan bisa dijelaskan/diukur dengan membandingkan persepsi pelayanan yang diterima dengan pelayanan yang diinginkan/diharapkan. Survei ini menayakan pendapat masyarakat mengenai pengalaman dalam memperoleh pelayanan di Pengadilan Negeri Yogyakarta, yang diambil dengan kuesioner.

Pelaksanaan survei dan laporan survei ini, masih perlu perbaikan-perbaikan ke depan agar lebih baik. Kritik dan saran yang membangun senantiasa kami terima. Semoga laporan ringkas ini, berguna bagi berbagai pihak, khususnya segenap jajaran pimpinan Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA dan masyarakat pengguna layanan di Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, Oktober 2026
Tim Survei

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 1

BAB I PENDAHULUAN 6

1. Latar Belakang 6
2. Maksud Dan Tujuan 6
3. Landasan Hukum 6
4. Rencana Kerja Pelaksanaan 7

BAB II METODOLOGI SURVEI 8

1. Metode Penelitian 8
2. Populasi Dan Sampel 8
3. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis 8
4. Teknik Pengumpulan Data 8
5. Teknik Analisis Data 8
6. Tahapan pelaksanaan 9

BAB III PROFIL RESPONDEN 11

1. Tingkat pendidikan responden 11
2. Pekerjaan responden 11
3. Domisili responden 12
4. Kelompok usia responden 13
5. Jenis Layanan 13

BAB IV PENGOLAHAN HASIL SURVEI 15

1. Indikator Pelayanan Diluar Prosedur 15
2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan 16
3. Indikator Menjual Pengaruh 17
4. Indikator Transparansi Biaya 18
5. Indikator Transaksi Rahasia/Pungutan Liar 18
6. Indikator Hadiah 19
7. Transparansi Pembayaran 20
8. Indikator Percaloan 21
9. Indikator Praktek KKN 22

10. Indikator Intervensi Perkara 22
BAB V PENUTUP 24
A. Kesimpulan 24
B. Rekomendasi 25
1. Prioritas Perbaikan pada Unsur dengan Nilai Terendah 25
2. Pemeliharaan dan Peningkatan Unsur Lainnya 26
3. Penguatan Pengawasan dan Budaya Antikorupsi 27
4. Pelaksanaan Tindak Lanjut secara Terukur 28
C. Penutup 28
LAMPIRAN 29

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Model alur penyusunan survei IPK menuju Zona Integritas 9
Tabel 2. Ruang lingkup survei Indeks Presepsi Korupsi 9
Tabel 3.Nilai Persepsi 10
Tabel 4. Tingkat pendidikan responden 11
Tabel 5.Jenis pekerjaan responden 12
Tabel 6.Domisili Responden 12
Tabel 7. Usia responden 13
Tabel 8. Layanan 13
Tabel 9. Indeks Pada Indikator Pelayanan Diluar Prosedur 15
Tabel 10. Indeks pada indikator Penyalahgunaan Jabatan 16
Tabel 11. Indeks pada indikator Menjual Pengaruh 17
Tabel 12. Indeks pada indikator Transparansi Biaya 18
Tabel 13. indeks pada indikator transaksi rahasia/Pungutan Liar 19
Tabel 14. Indikator Hadiah 19
Tabel 15. Transparansi Pembayaran 20
Tabel 16. Percaloan 21
Tabel 17. Indeks pada indikator Praktek KKN 22
Tabel 18. Indeks pada indikator Intervensi Perkara 23

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Tingkat Pendidikan Responden 11
Grafik 2. Pekerjaan Responden 12
Grafik 3. Domisili Responden 12
Grafik 4. Usia Responden 13
Grafik 5. layanan 14
Grafik 6. Pelayanan Tidak Sesuai Prosedur 15
Grafik 7. Penyalahgunaan Jabatan 16
Grafik 8. Menjual Pengaruh 17
Grafik 9. Transparansi Biaya 18
Grafik 10. Transaksi Rahasia 19
Grafik 11. Hadiah 20
Grafik 12. Transparansi Pembayaran 20
Grafik 13. Percaloan 21
Grafik 14. Praktek KKN 22
Grafik 15. Intervensi Perkara 23

BAB I
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Satuan Kerja pada pengadilan berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitment tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pengadilan merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar.

Pengadilan Negeri yang akan ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi untuk menjadi lokasi *Pilot Project* menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan di lingkungannya.

ZI menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

2. Maksud Dan Tujuan

Maksud Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

3. Landasan Hukum

a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.

b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

c) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

d) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

e) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani.

f) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan KorupsiJangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.

g) Peraturan Presiden Republik lndonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.

4. Rencana Kerja Pelaksanaan

1. Persiapan

Survei Persepesi Anti Korupsi di Pengadilan Negeri Yogyakarta ini dilaksanakan pada bulan Juli - September 2026.

2. Pelaksanaan Pengumpulan Data

a. Tahapan pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupasi di Pengadilan Negeri Yogyakarta bedasarkan pada *Keputusan Jendral Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1365/DJU/SK/HM.02.3/2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Survei Dan Tata Cara Penggunaan Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SiSuper) Pada Direktorat Jendral Peradilan Umum Dan Peradilan Dibawahnya.*

b. Penginputan data survei persepsi anti korupsi melalui E- survey dilakukan dengan mengakses link berikut: http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id

c. Melakukan pengecekan secara berkala pada sistem e-survey untuk mengetahui perkembangan e-survey.

BAB II
METODOLOGI SURVEI

1. Metode Penelitian

Penelitian Indeks Persepsi Korupsi (IPAK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

2. Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan di Satuan Kerja Pengadilan Negeri Yogyakarta. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *accidental sampling*. *Accidental sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan Tim Survei dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

3. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti agar didapat data-data penelitian yang akurat, dalam hal ini yaitu Kantor Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti dalam hal ini adalah proses pemberian layanan di pengadilan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data pada penelitian ini diambil dengan instrumen berupa Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik *(SiSuper)*. Aplikasi ini diletakan/disediakan di PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Setiap pengguna layanan yang telah menerima layanan di Pengadilan Negeri Yogyakarta disarankan/diarahkan untuk mengisi aplikasi SiSuper.

Data pada penelitian ini diambil dengan instrument online berupa kuesioner dengan http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id

5. Teknik Analisis Data

Analisis data untuk menentukan *indeks korupsi* menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1 – 4.

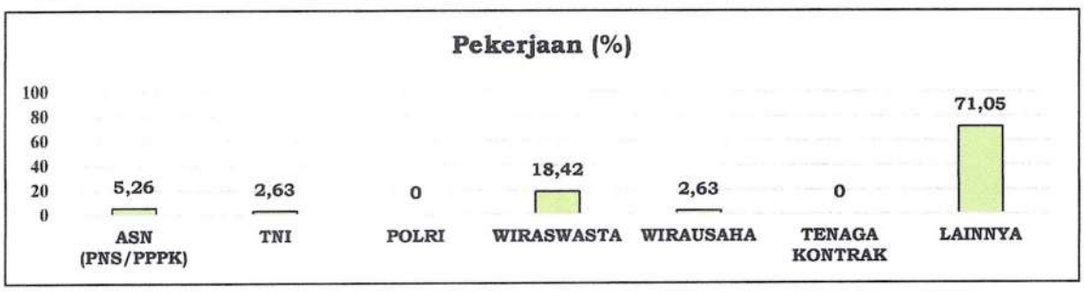
Tabel 3.Nilai Persepsi

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPK	Mutu	Kinerja
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 62.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

Tabel 5.Jenis pekerjaan responden

No	Pekerjaan Utama	Frekuensi	%
1	ASN (PNS/PPPK)	2	5,128
2	TNI	1	2,564
3	POLRI	0	0
4	WIRASWASTA	7	17,948
5	WIRAUSAHA	1	2,564
6	TENAGA KONTRAK	0	0
7	LAINNYA	28	71,794
JUMLAH		39	100

Dari sisi jenis pekerjaan dari 39 responden menunjukkan bahwa sebanyak 28 responden atau 71,794% responden pengguna layanan Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Yogyakarta mememiliki pekerjaan lainnya. Dalam grafik ditampilkan sebagai berikut:



Grafik 2. Pekerjaan Responden

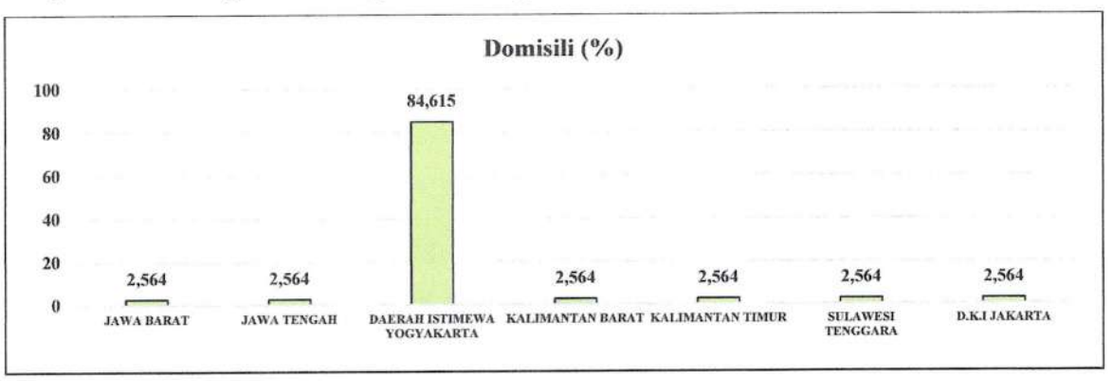
3. Domisili responden

Dari hasil survei dari aplikasi *SiSuper Badilum* responden pengguna layanan Satuan Kerja pada Pengadilan Pengadilan Negeri Yogyakarta berdasarkan domisili responden dapat ditampilkan dalam tabel berikut ini

Tabel 6.Domisili Responden

No	Daerah Domisili	Jumlah	%
1	JAWA BARAT	1	2,564
2	JAWA TENGAH	1	2,564
3	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	33	84,615
4	KALIMANTAN BARAT	1	2,564
5	KALIMANTAN TIMUR	1	2,564
6	SULAWESI TENGGARA	1	2,564
7	D.K.I JAKARTA	1	2,564
JUMLAH		39	100

Dari data yang terkumpul selama survei, diperoleh data bahwa berdasar domilisi, responden paling banyak berasal dari D.I.Yogyakarta dengan 39 responden atau 84,615%.Dalam grafik ditampilkan sebagai berikut:



Grafik 3. Domisili Responden

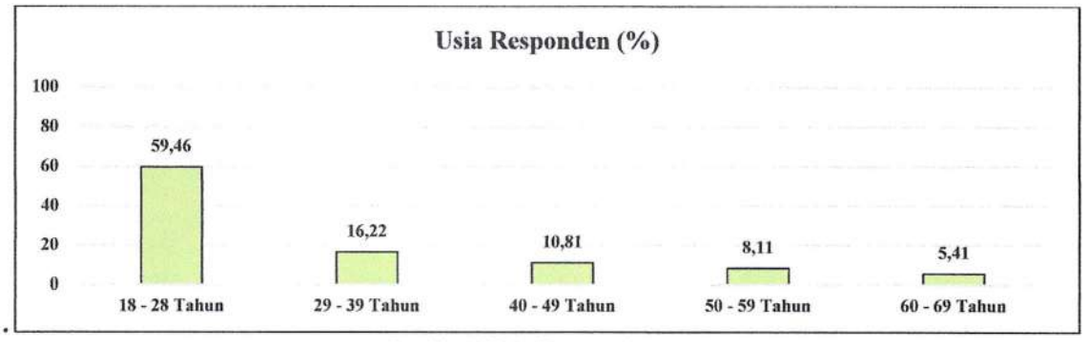
4. Kelompok usia responden

Dari hasil survei dari aplikasi *SiSuper Badilum* responden pengguna layanan Satuan Kerja pada Pengadilan Pengadilan Negeri Yogyakarta berdasarkan kelompok usia responden dapat ditampilkan dalam tabel berikut ini

Tabel 7. Usia responden

Kategori Umur	Jumlah	Persentase (%)
18 - 28 Tahun	22 Orang	59,46
29 - 39 Tahun	6 Orang	16,22
40 - 49 Tahun	4 Orang	10,81
50 - 59 Tahun	3 Orang	8,11
60 - 69 Tahun	2 Orang	5,41

Sementara itu jika melihat responden pengguna layanan Satuan Kerja pada Pengadilan Pengadilan Negeri Yogyakarta berdasarkan kelompok usia, menunjukkan bahwa mayoritas pengguna layanan berada dalam kelompok usia produktif yaitu pada usia antara 18 tahun s/d 28 tahun dengan jumlah 22 0rang atau 59,46% . Dalam grafik ditampilkan sebagai berikut:



Grafik 4. Usia Responden

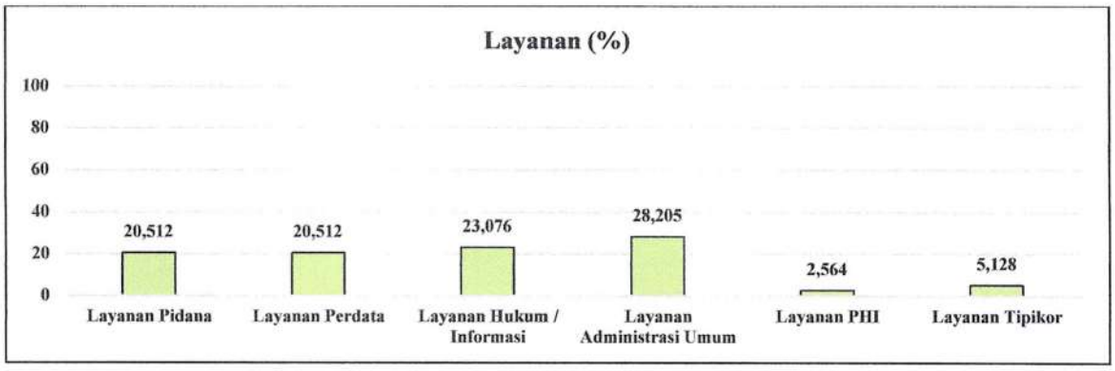
5. Jenis Layanan

Dari hasil survei dari aplikasi *SiSuper Badilum* responden pengguna layanan Satuan Kerja pada Pengadilan Pengadilan Negeri Yogyakarta berdasarkan jenis layanan responden dapat ditampilkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 8. Layanan

No	Layanan Satker	Total Pemohon	%
1	Layanan Pidana	8 Orang	20,512
2	Layanan Perdata	8 Orang	20,512
3	Layanan Hukum / Informasi	9 Orang	23,076
4	Layanan Administrasi Umum	11 Orang	28,205
5	Layanan PHI	1 Orang	2,564
6	Layanan Tipikor	2 Orang	5,128

Sementara itu jika melihat responden pengguna layanan Satuan Kerja pada Pengadilan Pengadilan Negeri Yogyakarta berdasarkan meja layanan yang dikunjungi, menunjukkan bahwa mayoritas pengguna layanan menggunakan meja layanan Administrasi Umum dengan jumlah 11 0rang atau 28,205% . Dalam grafik ditampilkan sebagai berikut:



Grafik 5. layanan

BAB IV
PENGOLAHAN HASIL SURVEI

Pada bagian ini disajikan hasil pengolahan data Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) yang telah dilaksanakan pada Triwulan III Tahun 2026 melalui aplikasi *siSUPER Badilum* di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Data yang diperoleh dari responden diolah dan dianalisis berdasarkan 10 unsur pelayanan sesuai dengan pedoman dalam **Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017**. Hasil ini memberikan gambaran mengenai tingkat kepuasan masyarakat serta menjadi dasar dalam melakukan evaluasi dan peningkatan kualitas pelayanan.

Berdasarkan survei kepuasan masyarakat di Pengadilan Negeri Yogyakarta melalui Aplikasi *siSuSUPER* Badilum dengan 39 responden. Adapun hasil analisis data yang telah dilakukan di Aplikasi SiSuper pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam Periode Tri Wulan III Tahun 2026 (Juli – September) sebesar **3,84/96,03%** berada pada kategori "**SANGAT BAIK**" (pada interval 88,31 s/d 100,00).

Hasil SPAK tersebut di atas, terdiri dari 10 (sepuluh) ruang lingkup, analisis selanjutnya adalah mendeskripsikan hasil analisis terhadap hasil survei, sebagai berikut;

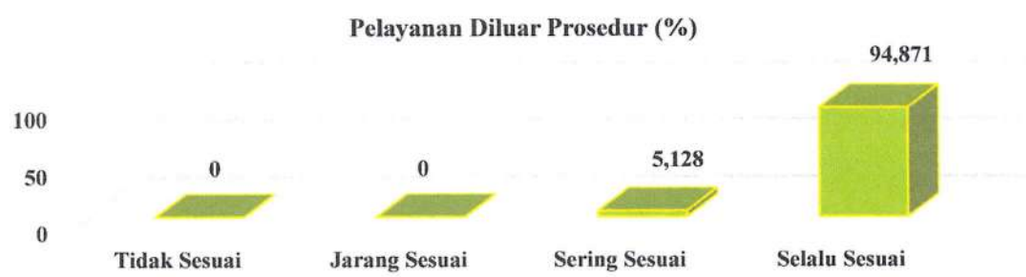
1. Indikator Pelayanan Diluar Prosedur

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Pelayanan Diluar Prosedur dari rentang jawaban yang diperoleh dari *Aplikasi SiSuper* menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 9. Indeks Pada Indikator Pelayanan Diluar Prosedur

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Tidak Sesuai	1	0	0
2.	Jarang Sesuai	2	0	0
3.	Sering Sesuai	3	2	5,128
4.	Selalu Sesuai	4	37	94,871
Jumlah			39	100

Berdasarkan tabel diatas secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini:



Grafik 6. Pelayanan Tidak Sesuai Prosedur

Dari dari tabel dan grafik Indikator Pelayanan Diluar Prosedur dari 39 responden yang paling banyak menjawab *Selalu Sesuai* sebanyak 37 responden atau 94,871%.

Menurut hasil perhitungan IPAK dari aplikasi *SiSuper Badilum* pada Perode Triwulan III Tahun 2026 diperoleh data sebagai berikut:

Jumlah Nilai per Unsur	***154***
NRR per Unsur	***3.949***
NRR Tertimbang	***0.395***

Dari data diatas dikonversikan dalam Standar Nilai dan Bobot SPAK masuk dalam kategori mutu sangat baik masuk dalam skala 100 yaitu 88,31 – 100,00 dan masuk dalam Skala 4 3,53 – 4,00. Nilai sebesar berada pada kategori A **"Sangat Baik"**.

Indeks tersebut dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Yogyakarta pada indikator pelayanan diluar prosedur Peraturan masuk dalam kategori *Bersih Dari Korupsi*.

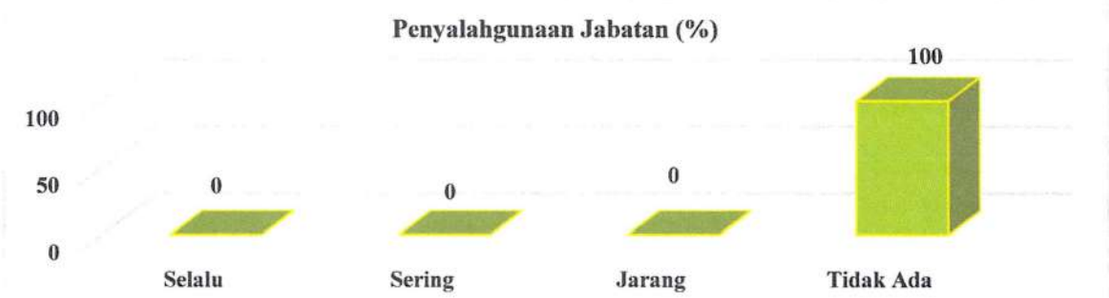
2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Penyalahgunaan Jabatan dari rentang jawaban yang diperoleh dari Aplikasi SiSuper menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 10. Indeks pada indikator Penyalahgunaan Jabatan

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Selalu Meminta Imbalan	1	0	0
2.	Sering Meminta Imbalan	2	0	0
3.	Jarang Meminta Imbalan	3	0	0
4.	Tanpa Meminta Imbalan	4	39	100
Jumlah			39	100

Berdasarkan tabel diatas secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini



Grafik 7. Penyalahgunaan Jabatan

Dari dari tabel dan grafik Ruang Lingkup Penyalahgunaan Jabatan dari 39 responden yang paling banyak menjawab *Tanpa Meminta Imbalan* sebanyak 39 responden atau 100%.

Menurut hasil perhitungan IPAK dari aplikasi SiSuper pada Perode Triwulan III Tahun 2026 diperoleh data sebagai berikut:

Jumlah Nilai per Unsur	***156***
NRR per Unsur	***4,000***
NRR Tertimbang	***0.400***

Dari data diatas dikonversikan dalam Standar Nilai dan Bobot SPAK masuk dalam kategori mutu sangat baik, masuk dalam skala 100 yaitu 88,31 – 100,00 dan masuk dalam Skala 4 3,53 – 4,00. Nilai mutu berada pada kategori A **"Sangat Baik"**.

Indeks tersebut dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Yogyakarta pada indikator Penyalahgunaan Jabatan masuk dalam kategori *Bersih Dari Korupsi.*

3. Indikator Menjual Pengaruh

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Menjual Pengaruh dari rentang jawaban yang diperoleh dari Aplikasi *SiSuper Badilum* menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 11. Indeks pada indikator Menjual Pengaruh

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Selalu	1	5	12,820
2.	Sering	2	1	2,564
3.	Jarang	3	0	0
4.	Tidak Ada	4	33	84,615
Jumlah			39	100

Berdasarkan tabel diatas secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini:



Grafik 8. Menjual Pengaruh

Dari dari tabel dan grafik Ruang Lingkup Menjual Pengaruh dari 39 responden yang paling banyak menjawab *Tidak Ada* sebanyak 33 responden atau 84,615%.

Menurut hasil perhitungan SPAK dari aplikasi SiSuper pada Perode Triwulan III Tahun 2026 diperoleh data sebagai berikut:

Jumlah Nilai per Unsur	***139***
NRR per Unsur	***3.564***
NRR Tertimbang	***0.356***

Dari data diatas dikonversikan dalam Standar Nilai dan Bobot SPAK masuk dalam kategori mutu sangat baik, masuk dalam skala 100 yaitu 88,31 – 100,00 dan masuk dalam Skala 4 3,53 – 4,00. Nilai mutu berada pada kategori A **"Sangat Baik"**.

Indeks tersebut dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Yogyakarta pada indikator menjual pengaruh masuk dalam kategori *Bersih Dari Korupsi*.

4. Indikator Transparansi Biaya

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transparansi Biaya dari rentang jawaban yang diperoleh dari Aplikasi SiSuper menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 12. Indeks pada indikator Transparansi Biaya

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Selalu	4	37	94,871
2.	Sering	3	1	2,564
3.	Jarang	2	1	2,564
4.	Tidak Pernah	1	0	0
Jumlah			39	100

Berdasarkan tabel diatas secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini:



Grafik 9. Transparansi Biaya

Dari dari tabel dan grafik Ruang Lingkup Transparansi Biaya dari 39 responden yang paling banyak menjawab *Selalu (selalu transparan dalam biaya pelayanan)* sebanyak 37 responden atau 94,871%.

Menurut hasil perhitungan IPAK dari aplikasi SiSuper pada Perode Triwulan III Tahun 2026 diperoleh data sebagai berikut:

Jumlah Nilai per Unsur	*153*
NRR per Unsur	*3.923*
NRR Tertimbang	*0.392*

Dari data diatas dikonversikan dalam Standar Nilai dan Bobot IPAK masuk dalam kategori mutu sangat baik, masuk dalam skala 100 yaitu 88,31 – 100,00 dan masuk dalam Skala 4 3,53 – 4,00. Nilai mutu berada pada kategori A **"Sangat Baik"**.

Indeks tersebut dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Yogyakarta pada indikator transparansi biaya masuk dalam kategori *Bersih dari Korupsi*

5. Indikator Transaksi Rahasia/Pungutan Liar

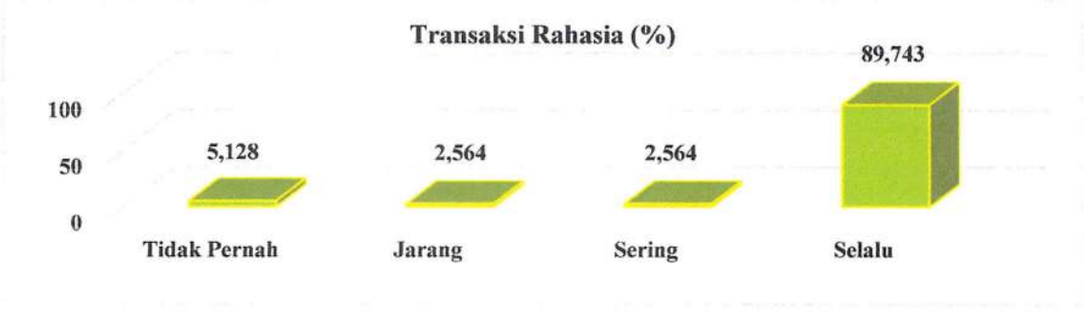
Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Indikator Transaksi Rahasia/Pungutan Liar dari rentang jawaban yang diperoleh dari Aplikasi SiSuper

menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 13. indeks pada indikator transaksi rahasia/Pungutan Liar

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Tidak Pernah	1	2	5,128
2.	Jarang	2	1	2,564
3.	Sering	3	1	2,564
4.	Selalu	4	35	89,743
Jumlah			39	100

Berdasarkan tabel diatas secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini:



Grafik 10. Transaksi Rahasia

Dari dari tabel dan grafik Ruang Lingkup Transaksi Rahasia/Pungutan Liar dari 39 responden yang paling banyak menjawab *Selalu membayar dengan tarif resmi* sebanyak 35 responden atau 89,743%.

Menurut hasil perhitungan IPAK dari aplikasi SiSuper pada Perode Triwulan III Tahun 2026 diperoleh data sebagai berikut:

Jumlah Nilai per Unsur	*147*
NRR per Unsur	*3,769*
NRR Tertimbang	*0.377*

Dari data diatas dikonversikan dalam Standar Nilai dan Bobot SPAK masuk dalam kategori mutu sangat baik, masuk dalam skala 100 yaitu 88,31 – 100,00 dan masuk dalam Skala 4 3,53 – 4,00. Nilai mutu berada pada kategori A **"Sangat Baik"**.

Indeks tersebut dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Yogyakarta pada indikator Ruang Lingkup Transaksi Rahasia/Pungutan Liar dalam kategori *bersih Dari Korupsi.*

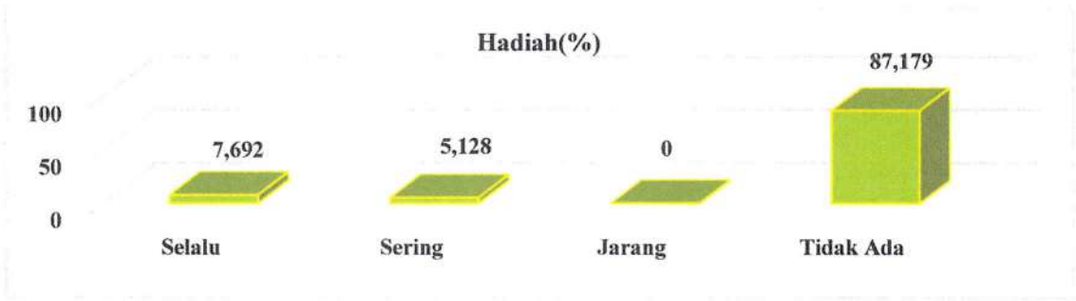
6. Indikator Hadiah

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Hadiah dari rentang jawaban yang diperoleh dari Aplikasi SiSuper menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 14. Indikator Hadiah

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Selalu	1	3	7,692
2.	Sering	2	2	5,128
3.	Jarang	3	0	0
4.	Tidak Ada	4	34	87,179
Jumlah			39	100

Berdasarkan tabel diatas secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini:



Grafik 11. Hadiah

Dari dari tabel dan grafik Ruang Lingkup Hadiah dari 39 responden yang paling banyak menjawab *Tidak Ada* sebanyak 34 responden atau 87,179%.

Menurut hasil perhitungan SPAK dari aplikasi SiSuper pada Perode Triwulan III Tahun 2026 diperoleh data sebagai berikut:

Jumlah Nilai per Unsur	**143**
NRR per Unsur	**3,677**
NRR Tertimbang	**0,367**

Dari data diatas dikonversikan dalam Standar Nilai dan Bobot SPAK masuk dalam kategori mutu sangat baik, masuk dalam skala 100 yaitu 88,31 – 100,00 dan masuk dalam Skala 4 3,53 – 4,00. Nilai mutu berada pada kategori A **"Sangat Baik"**.

Indeks tersebut dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Yogyakarta pada indicator Hadia masuk dalam kategori *Bersih dari Korupsi.*

7. Transparansi Pembayaran

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transparansi Pembayaran dari rentang jawaban yang diperoleh dari Aplikasi SiSuper menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 15. Transparansi Pembayaran

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Tidak Pernah	1	1	2,564
2.	Jarang	2	1	2,564
3.	Sering	3	1	2,564
4.	Selalu	4	36	92,307
Jumlah			39	100

Berdasarkan tabel diatas secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini:



Grafik 12. Transparansi Pembayaran

Dari dari tabel dan grafik indikator Ruang Lingkup Transparansi Pembayaran dari 39 responden yang paling banyak menjawab *Selalu* sebanyak 36 responden atau 92,307%.
Menurut hasil perhitungan IPAK dari aplikasi SiSuper pada Perode Triwulan III Tahun 2026 diperoleh data sebagai berikut:

Jumlah Nilai per Unsur	**150**
NRR per Unsur	**3.846**
NRR Tertimbang	**0.395**

Dari data diatas dikonversikan dalam Standar Nilai dan Bobot SPAK masuk dalam kategori mutu sangat baik, masuk dalam skala 100 yaitu 88,31 – 100,00 dan masuk dalam Skala 4 3,53 – 4,00. Nilai mutu berada pada kategori A **"Sangat Baik"**.
Indeks tersebut dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Yogyakarta pada indikator Transparansi Pembayaran masuk dalam kategori *Bersih Dari Korupsi.*

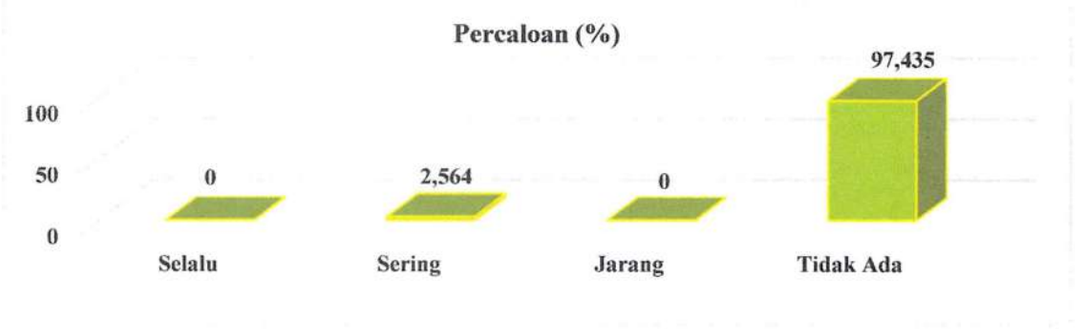
8. Indikator Percaloan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Percaloan dari rentang jawaban yang diperoleh dari Aplikasi SiSuper menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 16. Percaloan

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Selalu	1	0	0
2.	Sering	2	1	2,564
3.	Jarang	3	0	0
4.	Tidak Ada	4	38	97,435
Jumlah			39	100

Berdasarkan tabel diatas secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini:



Grafik 13. Percaloan

Dari dari tabel dan grafik Ruang Lingkup Percaloan dari 39 responden yang paling banyak menjawab *Tidak ada* sebanyak 38 responden atau 97,435%.
Menurut hasil perhitungan SPAK dari aplikasi SiSuper pada Perode Triwulan III Tahun 2026 diperoleh data sebagai berikut:

Jumlah Nilai per Unsur	154
NRR per Unsur	3,949
NRR Tertimbang	0.395

Dari data diatas dikonversikan dalam Standar Nilai dan Bobot SPAK masuk dalam kategori mutu sangat baik, masuk dalam skala 100 yaitu 88,31 – 100,00 dan masuk dalam Skala 4 3,53 – 4,00. Nilai mutu berada pada kategori A **"Sangat Baik"**.

Indeks tersebut dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Yogyakarta pada indikator Percaloan masuk dalam kategori *Bersih Dari Korupsi.*

9. Indikator Praktek KKN

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Praktek KKN dari rentang jawaban yang diperoleh dari Aplikasi SiSuper menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 17. Indeks pada indikator Praktek KKN

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Selalu	1	0	0
2.	Sering	2	1	2,564
3.	Jarang	3	2	5,128
4.	Tidak Ada	4	36	92,307
Jumlah			39	100

Berdasarkan tabel diatas secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini:



Grafik 14. Praktek KKN

Dari dari tabel dan grafik Ruang Lingkup Praktek KKN dari 39 responden yang paling banyak menjawab *Tidak ada* sebanyak 36 responden atau 92,307%.

Menurut hasil perhitungan SPAK dari aplikasi SiSuper pada Perode Triwulan III Tahun 2026 diperoleh data sebagai berikut:

Jumlah Nilai per Unsur	**152**
NRR per Unsur	**3,897**
NRR Tertimbang	**0,390**

Dari data diatas dikonversikan dalam Standar Nilai dan Bobot SPAK masuk dalam kategori mutu sangat baik, masuk dalam skala 100 yaitu 88,31 – 100,00 dan masuk dalam Skala 4 3,53 – 4,00. Nilai mutu berada pada kategori A **"Sangat Baik"**.

Indeks tersebut dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Yogyakarta pada indikator Parktek KKN masuk dalam kategori *Bersih Dari Korupsi.*

10. Indikator Intervensi Perkara

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Intervensi Perkara dari

rentang jawaban yang diperoleh dari Aplikasi SiSuper menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 18. Indeks pada indikator Intervensi Perkara

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Selalu	1	1	2,564
2.	Sering	2	1	2,564
3.	Jarang	3	1	2,564
4.	Tidak Ada	4	36	92,307
Jumlah			39	100

Berdasarkan tabel diatas secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini



Grafik 15. Intervensi Perkara

Dari dari tabel dan grafik Ruang Lingkup Intervensi Perkara dari 39 responden yang paling banyak menjawab *Tidak ada* sebanyak 36 responden atau 92,307%.

Menurut hasil perhitungan IPAK dari aplikasi SiSuper pada Perode Triwulan III Tahun 2026 diperoleh data sebagai berikut:

Jumlah Nilai per Unsur	**150**
NRR per Unsur	**3,846**
NRR Tertimbang	**0,395**

Dari data diatas dikonversikan dalam Standar Nilai dan Bobot SPAK masuk dalam kategori mutu sangat baik, masuk dalam skala 100 yaitu 88,31 – 100,00 dan masuk dalam Skala 4 3,53 – 4,00. Nilai mutu berada pada kategori A **"Sangat Baik"**.

Indeks tersebut dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Yogyakarta pada indikator Intervensi Perkara masuk dalam kategori *Bersih Dari Korupsi.*

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pelaksanaan Survei Persepsi Antikorupsi (SPAK) pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, diperoleh nilai rata-rata tertimbang sebesar **3,841 dari skala maksimal 4,00**, yang setara dengan nilai konversi sebesar **96,025 dari skala 100**. Hasil tersebut menunjukkan bahwa persepsi responden terhadap upaya pencegahan korupsi dalam penyelenggaraan pelayanan pada Pengadilan Negeri Yogyakarta secara umum menunjukkan capaian yang positif.

Hasil survei terhadap 10 unsur penilaian menunjukkan bahwa unsur U2, yaitu Penyalahgunaan Jabatan, memperoleh nilai rata-rata per unsur tertinggi sebesar 4,000. Selanjutnya, unsur U1, yaitu Manipulasi Peraturan, dan U8, yaitu Transparansi Pembayaran, masing-masing memperoleh nilai sebesar 3,949. Capaian tersebut perlu dipertahankan melalui konsistensi penerapan peraturan, penguatan integritas aparatur, serta keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan pelayanan.

Di sisi lain, terdapat beberapa unsur yang perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut. Unsur U3, yaitu Menjual Pengaruh, memperoleh nilai terendah sebesar 3,564, diikuti oleh unsur U6, yaitu Biaya Tambahan, sebesar 3,667, dan unsur U5, yaitu Transaksi Rahasia, sebesar 3,769. Hasil tersebut menunjukkan bahwa ketiga unsur tersebut perlu menjadi prioritas evaluasi untuk mengidentifikasi potensi risiko serta menentukan langkah pencegahan yang lebih efektif.

Unsur U3 berkaitan dengan persepsi masyarakat terhadap kemungkinan penggunaan pengaruh atau kedekatan tertentu untuk memperoleh kemudahan pelayanan. Unsur U6 berkaitan dengan persepsi terhadap kemungkinan adanya biaya di luar ketentuan resmi, sedangkan unsur U5 berkaitan dengan persepsi terhadap kemungkinan adanya transaksi yang tidak transparan dalam proses pelayanan.

Meskipun nilai survei secara keseluruhan menunjukkan capaian yang positif, hasil tersebut tidak serta-merta meniadakan kemungkinan adanya risiko penyimpangan. Oleh karena itu, hasil SPAK perlu ditindaklanjuti melalui evaluasi yang terarah, pengawasan internal, penguatan budaya integritas, serta perbaikan berkelanjutan guna mewujudkan pelayanan peradilan yang transparan, akuntabel, profesional, dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil pengolahan dan analisis Survei Persepsi Anti Korupsi, disampaikan rekomendasi sebagai berikut.

1. Prioritas Perbaikan pada Unsur dengan Nilai Terendah

a. U3 – Menjual Pengaruh (Nilai 3,564)

Pengadilan Negeri Yogyakarta perlu meningkatkan pengawasan dan memastikan bahwa seluruh proses pelayanan dilaksanakan berdasarkan ketentuan, prosedur, dan standar operasional yang berlaku. Setiap pengguna layanan harus memperoleh perlakuan yang setara tanpa dipengaruhi oleh hubungan pribadi, kedekatan, jabatan, maupun intervensi pihak tertentu.

Langkah tindak lanjut yang direkomendasikan meliputi:

- Memperkuat pengawasan terhadap potensi intervensi atau penggunaan pengaruh dalam proses pelayanan.
- Memastikan bahwa petugas memberikan pelayanan secara objektif, adil, dan tidak diskriminatif.
- Menyediakan serta menyosialisasikan saluran pengaduan bagi masyarakat yang menemukan indikasi penggunaan pengaruh untuk memperoleh perlakuan khusus.
- Melaksanakan evaluasi berkala terhadap kepatuhan aparatur dalam memberikan pelayanan sesuai prosedur.

b. U6 – Biaya Tambahan (Nilai 3,667)

Pengadilan Negeri Yogyakarta perlu memastikan bahwa seluruh biaya pelayanan yang dibebankan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan resmi yang berlaku. Tidak boleh terdapat pungutan di luar ketentuan maupun permintaan pembayaran yang tidak memiliki dasar hukum.

Langkah tindak lanjut yang direkomendasikan meliputi:

- Memublikasikan informasi biaya pelayanan secara jelas dan mudah diakses oleh masyarakat.
- Memastikan seluruh petugas memahami dan mematuhi ketentuan mengenai biaya pelayanan.
- Melakukan pengawasan terhadap potensi pungutan liar dan permintaan biaya di luar ketentuan.

- Menyediakan mekanisme pelaporan yang mudah diakses apabila masyarakat menemukan indikasi pungutan tidak resmi.
- Menindaklanjuti setiap pengaduan sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. U5 – Transaksi Rahasia (Nilai 3,769)

Pengadilan Negeri Yogyakarta perlu memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan pelayanan guna mencegah terjadinya transaksi yang tidak sesuai ketentuan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Langkah tindak lanjut yang direkomendasikan meliputi:

- Memastikan setiap proses administrasi dan transaksi pelayanan dilaksanakan melalui mekanisme resmi.
- Memperkuat pencatatan dan dokumentasi transaksi agar dapat ditelusuri dan diperiksa sesuai kewenangan.
- Melarang segala bentuk kesepakatan atau transaksi di luar prosedur resmi yang berkaitan dengan pemberian pelayanan.
- Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai prosedur pelayanan yang benar dan saluran pengaduan yang tersedia.
- Melaksanakan pengawasan secara berkala untuk mendeteksi dan mencegah potensi penyimpangan.

2. Pemeliharaan dan Peningkatan Unsur Lainnya

Selain tiga unsur prioritas tersebut, Pengadilan Negeri Yogyakarta perlu mempertahankan capaian unsur lainnya melalui langkah-langkah berikut.

a. U1 – Manipulasi Peraturan (Nilai 3,949)

Memastikan seluruh pelayanan dilaksanakan berdasarkan peraturan dan prosedur yang berlaku, tanpa perubahan, penyimpangan, atau penerapan ketentuan secara tidak semestinya untuk menguntungkan pihak tertentu.

b. U2 – Penyalahgunaan Jabatan (Nilai 4,000)

Mempertahankan penerapan kode etik dan pedoman perilaku aparatur, memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan kewenangan, serta memastikan jabatan dan kewenangan tidak digunakan untuk kepentingan pribadi maupun pihak tertentu.

c. **U4 – Transparansi Biaya (Nilai 3,923)**

Mempertahankan keterbukaan informasi mengenai jenis, dasar hukum, dan besaran biaya pelayanan yang berlaku, serta memastikan masyarakat dapat mengakses informasi tersebut dengan mudah.

d. **U7 – Hadiah (Nilai 3,846)**

Memperkuat pemahaman dan kepatuhan aparatur terhadap ketentuan mengenai gratifikasi, termasuk larangan menerima hadiah atau pemberian yang berkaitan dengan jabatan dan pelayanan, sesuai dengan peraturan yang berlaku.

e. **U8 – Transparansi Pembayaran (Nilai 3,949)**

Memastikan setiap pembayaran dilakukan melalui mekanisme resmi, disertai bukti pembayaran yang sah apabila dipersyaratkan, serta didukung informasi yang jelas mengenai prosedur dan status pembayaran.

f. **U9 – Percaloan (Nilai 3,897)**

Meningkatkan pengawasan terhadap akses pelayanan dan memastikan masyarakat dapat mengurus keperluannya melalui prosedur resmi tanpa perantara yang menawarkan kemudahan dengan imbalan tertentu. Informasi mengenai prosedur pelayanan perlu disosialisasikan secara luas.

g. **U10 – Perbuatan Curang (Nilai 3,846)**

Memperkuat budaya kerja yang menjunjung kejujuran, kedisiplinan, dan tanggung jawab serta memastikan setiap tahapan pelayanan dilaksanakan secara benar, objektif, dan sesuai ketentuan. Dugaan perbuatan curang perlu ditindaklanjuti melalui mekanisme pengawasan yang berlaku.

3. Penguatan Pengawasan dan Budaya Antikorupsi

Pengadilan Negeri Yogyakarta perlu melaksanakan pengawasan internal secara berkala terhadap seluruh aspek pelayanan, termasuk kepatuhan terhadap standar operasional prosedur, transparansi biaya, mekanisme pembayaran, dan perilaku aparatur. Hasil pengawasan hendaknya menjadi dasar pelaksanaan pembinaan serta tindakan korektif apabila ditemukan ketidaksesuaian.

Selain itu, sosialisasi mengenai integritas, pencegahan gratifikasi, larangan pungutan liar, serta mekanisme pengaduan perlu dilaksanakan secara berkesinambungan kepada aparatur dan masyarakat pengguna layanan.

4. Pelaksanaan Tindak Lanjut secara Terukur

Untuk memastikan rekomendasi dapat dilaksanakan secara efektif, Pengadilan Negeri Yogyakarta perlu menyusun rencana tindak lanjut yang sekurang-kurangnya memuat:

- Unsur survei yang menjadi sasaran perbaikan.
- Bentuk kegiatan atau tindakan korektif yang akan dilaksanakan.
- Unit atau pejabat yang bertanggung jawab.
- Target waktu penyelesaian.
- Indikator keberhasilan dan mekanisme evaluasi.

Pelaksanaan tindak lanjut perlu dipantau secara berkala, terutama terhadap unsur U3, U6, dan U5. Pada pelaksanaan survei berikutnya, hasil evaluasi dapat digunakan untuk menilai efektivitas langkah perbaikan dan menentukan kebutuhan peningkatan lebih lanjut.

C. Penutup

Hasil Survei Persepsi Antikorupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta merupakan bahan evaluasi penting dalam upaya memperkuat integritas aparatur dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dengan nilai rata-rata tertimbang sebesar 3,841, capaian survei perlu dipertahankan dan ditingkatkan melalui pelaksanaan pelayanan yang transparan, akuntabel, profesional, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Perhatian khusus terhadap unsur Menjual Pengaruh, Biaya Tambahan, dan Transaksi Rahasia diharapkan dapat menjadi dasar penyusunan langkah perbaikan yang lebih terarah. Di samping itu, pemeliharaan capaian pada unsur lainnya tetap diperlukan agar seluruh aspek pelayanan memiliki standar integritas yang konsisten.

Melalui komitmen pimpinan, partisipasi seluruh aparatur, pengawasan yang berkelanjutan, serta keterlibatan masyarakat dalam memberikan masukan dan pengaduan, Pengadilan Negeri Yogyakarta diharapkan mampu terus memperkuat upaya pencegahan korupsi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

Demikian laporan hasil Survei Persepsi Antikorupsi ini disusun sebagai bahan evaluasi dan acuan tindak lanjut bagi Pengadilan Negeri Yogyakarta. Semoga rekomendasi yang disampaikan dapat dilaksanakan secara konsisten dan memberikan kontribusi nyata bagi terwujudnya pelayanan peradilan yang berintegritas, bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi.

LAMPIRAN

1. Hasil Survei Persepsi Anti Korupsi

SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK)

SATKER: PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA | Triwulan 3 2026

No	Responden	Demografi	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	U10	Waktu
1	IBNU HAJAR BUCHORIID: R-098057-IPAK-F83280EFFCHP : 088212496245	22 Th | Laki-lakiLayanan Pidana	4	4	1	3	3	2	3	4	4	3	30 September 2026
2	NADA MUSAQQOFI ANNISA ID: R-098057-IPAK-08F3E774D0HP : 08984386582	29 Th | PerempuanLayanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	28 September 2026
3	Anestia MahiraID: R-098057-IPAK-5C2114EECBHP : 08123456712	20 Th | PerempuanLayanan PHI	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	28 September 2026
4	Nada Musaqofi AnisaID: R-098057-IPAK-99F1445308HP : 08984386582	21 Th | PerempuanLayanan Administrasi Umum	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	28 September 2026
5	Raisa Arya ShebaID: R-098057-IPAK-732E9B64AFHP : 085700466229	34 Th | PerempuanLayanan Tipikor	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	28 September 2026
6	Titis SukowantoID: R-098057-IPAK-B1732417B8HP : 085743663936	62 Th | Laki-lakiLayanan Tipikor	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	28 September 2026
7	Aldo Nuri JayaputraID: R-098057-IPAK-079B8DFAFCHP : 08976543211	20 Th | PerempuanLayanan Administrasi Umum	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	25 September 2026
8	WAJIRANID: R-098057-IPAK-75231F771FHP : 085726073447	43 Th | Laki-lakiLayanan Perdata	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	24 September 2026
9	MURTI CAHYANA PUTRAID: R-098057-IPAK-6E5D66F435HP : 08164267276	52 Th | Laki-lakiLayanan Perdata	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	24 September 2026
10	DJAZIYAHID: R-098057-IPAK-C19EADA8A9HP : 081225327661	71 Th | PerempuanLayanan Perdata	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	24 September 2026
11	LailyID: R-098057-IPAK-434819A787HP : 082187634112	28 Th | PerempuanLayanan Perdata	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	24 September 2026
12	M.iqbal Dera SaputrsID: R-098057-IPAK-22D0ECCF1DHP : 082288461774	22 Th | Laki-lakiLayanan Administrasi Umum	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	24 September 2026
13	Nabi HatulID: R-098057-IPAK-E30BCCCF3BHP : 085602353556	20 Th | PerempuanLayanan Administrasi Umum	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	24 September 2026
14	Siti NuranilD: R-098057-IPAK-1053E46CB9HP : 085107140061	72 Th | PerempuanLayanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	24 September 2026
15	Mahesa Nanda PradiptaID: R-098057-	21 Th | PerempuanLayanan	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	24 September

No	Responden	Demografi	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	U10	Waktu
	IPAK-7F19BC9358HP : 089354623546	Administrasi Umum											2026
16	EksyID: R-098057-IPAK-961B2FBB19HP : 085643725592	33 Th | PerempuanLayanan Administrasi Umum	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	23 September 2026
17	Isro Rojana ID: R-098057-IPAK-AFEC9502A7HP : 082158332399	20 Th | PerempuanLayanan Administrasi Umum	4	4	1	4	1	4	4	4	4	4	18 September 2026
18	Dicky SaputraID: R-098057-IPAK-2F78ABF0F1HP : 081369009065	21 Th | Laki-lakiLayanan Administrasi Umum	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	18 September 2026
19	ARIE MARYATIID: R-098057-IPAK-75EFE04ED5HP : 0895401674486	38 Th | PerempuanLayanan Perdata	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	18 September 2026
20	ARIE MARYATI ID: R-098057-IPAK-83335E3E53HP : 0895401674486	38 Th | PerempuanLayanan Perdata	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	18 September 2026
21	AFRYAN A., S.H., M.H.ID: R-098057-IPAK-3C5F579807HP : 087887730403	35 Th | Laki-lakiLayanan Perdata	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	18 September 2026
22	TRI SUYATINIID: R-098057-IPAK-C9F3B33D31HP : 089658046092	42 Th | PerempuanLayanan Perdata	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	18 September 2026
23	QiendieID: R-098057-IPAK-3AA6A6C9D7HP : 0895417845858	23 Th | Laki-lakiLayanan Administrasi Umum	4	4	4	4	4	1	4	4	3	4	14 September 2026
24	DimasID: R-098057-IPAK-D090021308HP : 081717846542	22 Th | Laki-lakiLayanan Hukum / Informasi	4	4	1	4	4	4	1	4	4	4	14 September 2026
25	Priscilla Heidytria KartikaID: R-098057-IPAK-22C403378FHP : 082243972244	25 Th | PerempuanLayanan Administrasi Umum	4	4	1	4	4	1	4	4	4	4	31 Agustus 2026
26	Saiful Fakhri FadhilaID: R-098057-IPAK-8A12E9E054HP : 081212236348	25 Th | Laki-lakiLayanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	27 Agustus 2026
27	Puji HartantoID: R-098057-IPAK-810C6B90AFHP : 087711591852	42 Th | Laki-lakiLayanan Hukum / Informasi	3	4	4	4	1	4	4	4	4	4	26 Agustus 2026
28	Muhammad Rehandiarsa Yasjudan ID: R-098057-IPAK-C5E19A63EEHP : 0895621124625	25 Th | Laki-lakiLayanan Pidana	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	26 Agustus 2026
29	Ratna Juwita, S.HID: R-098057-IPAK-E894378BEFHP : 08122763814	59 Th | PerempuanLayanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	26 Agustus 2026
30	FaradilllaID: R-098057-IPAK-D72B410222HP : 085776472143	21 Th | PerempuanLayanan Administrasi Umum	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	26 Agustus 2026

No	Responden	Demografi	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	U10	Waktu
31	GuritnoID: R-098057-IPAK-4FC9B1604DHP : 081385677066	51 Th | Laki-lakiLayanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	26 Agustus 2026
32	MarwanID: R-098057-IPAK-BE1E9F4177HP : 081227709303	22 Th | Laki-lakiLayanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	20 Agustus 2026
33	AID: R-098057-IPAK-BB59C00900HP : 081332044131	42 Th | Laki-lakiLayanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	20 Agustus 2026
34	AdrianID: R-098057-IPAK-8E47878104HP : 085341663575	27 Th | Laki-lakiLayanan Pidana	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	14 Agustus 2026
35	Yuli PurwantiID: R-098057-IPAK-B40678E4A0HP : 0895613551364	28 Th | PerempuanLayanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5 Agustus 2026
36	Tanisa Dwi RamadhanID: R-098057-IPAK-0CB4FF27B1HP : 088215177819	25 Th | PerempuanLayanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5 Agustus 2026
37	Ervan Hamzah Siswanto PutroID: R-098057-IPAK-99EBFEC7E6HP : 0882005346526	19 Th | Laki-lakiLayanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5 Agustus 2026
38	SarintenID: R-098057-IPAK-20199BFBD5HP : 081548486167	64 Th | PerempuanLayanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5 Agustus 2026
39	ASID: R-098057-IPAK-45143AE526HP : 082261327377	23 Th | Laki-lakiLayanan Hukum / Informasi	4	4	1	4	4	1	4	4	4	1	13 Juli 2026

2. Hasil Tangkapan Layar di Aplikasi siSuper

a. Ringkasan Nilai



b. Responden



c. Domisli Responden

NO	DAERAH DOMISILI	JUMLAH
1	DKI JAKARTA	1 Orang
2	JAWA BARAT	1 Orang
3	JAWA TENGAH	1 Orang
4	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	33 Orang
5	KALIMANTAN BARAT	1 Orang
6	KALIMANTAN TIMUR	1 Orang
7	SULAWESI TENGGARA	1 Orang

d. Umur Responden

KATEGORI UMUR	JUMLAH	PERSENTASE (%)
18 - 28 Tahun	22 Orang	59,46 %
29 - 39 Tahun	6 Orang	16,22 %
40 - 49 Tahun	4 Orang	10,81 %
50 - 59 Tahun	3 Orang	8,11 %
60 - 69 Tahun	2 Orang	5,41 %

e. Jenis Layanan

NO	LAYANAN SATKER	TOTAL PEMOHON
1	Layanan Pidana	9 Org
2	Layanan Perdata	8 Org
3	Layanan Hukum / Informasi	9 Org
4	Layanan Administrasi Umum	11 Org
5	Layanan PHI	1 Org
6	Layanan Tipikor	2 Org

f. Nilai Per Unsur

SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK)

SATKER: PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA | Triwulan 3 2026

Nilai Indeks	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	U10	Total
Jumlah Nilai per Unsur	154	156	139	153	147	143	150	154	152	150	
NRR per Unsur	3.949	4.000	3.564	3.923	3.769	3.667	3.846	3.949	3.897	3.846	38.410
NRR Tertimbang	0.395	0.400	0.356	0.392	0.377	0.367	0.385	0.395	0.390	0.385	3.841

g. Tiga Unsur Teendah

↓ 3 UNSUR TERENDAH

Pernahkah dihubungi oleh seseorang (karyawan Pengadilan) yang akan membantu dalam pengurusan surat / berkas perkara ?	3.56
Apakah memberikan tanda terima kasih atas layanan yang diterima di Pengadilan (meskipun tidak diminta) ?	3.67
Apakah di Pengadilan selalu membayar sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan?	3.77